

**KONSEPSI MORAL POLITIK PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AKHMAD RIZANO**

**NIM: 00370180**

**PEMBIMBING:**

**1. PROF. DRS. H. ZARKASJI A SALAM**

**2. DRS. OCKTOBERINSYAH, M.AG.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Prof. Drs. H. Zarkasji A Salam**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Akhmad Rizano  
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di- Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Akhmad Rizano

N I M : 00370180

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah- Siyasah

Judul Skripsi : Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera

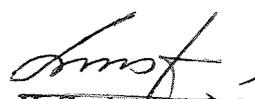
Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1425 H  
18 Oktober 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Hormat kami,  
Pembimbing I

  
**Prof. Drs. H. Zarkasji A Salam**  
NIP: 150046306

**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi saudara  
Akhmad Rizano  
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di- Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara :

Nama : Akhmad Rizano  
N I M : 00370180  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Jinayah- Siyasa

Judul Skripsi : Konsep Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1425 H  
18 Oktober 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat kami,  
Pembimbing II



**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag**  
NIP: 150289435

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**KONSEPSI MORAL POLITIK PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA**

Disusun oleh:

**AKHMAD RIZANO**

NIM. 00370180

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Syawal  
1425 H/ 7 Desember 2004, dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Syawal 1425 H

11 Desember 2004 M

Dekan Fakultas Syariah

**Drs. H. A. Malik Madany, MA**

NIP. 150182698

**Panitia Munaqasyah,**

**Ketua Sidang**



**Prof. Drs. H. Zarkasji A Salam**

NIP. 150046306

**Sekretaris Sidang**



**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**

NIP. 150260056

**Pembimbing I**



**Prof. Drs. H. Zarkasji A Salam**

NIP. 150046306

**Pembimbing II**



**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag**

NIP. 150289435

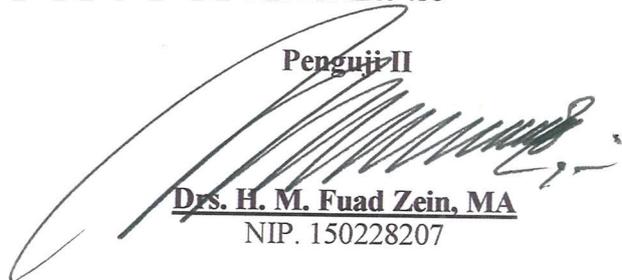
**Penguji I**



**Prof. Drs. H. Zarkasji A Salam**

NIP. 150046306

**Penguji II**



**Drs. H. M. Fuad Zein, MA**

NIP. 150228207

## MOTTO

*Sebaik-baik manusia adalah yang  
bermanfaat bagi manusia lainnya*

*Kerja, Karya dan Tindakan Nyata*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Satu persembahan terbaik ini teruntuk  
Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a  
kepada anak-anaknya*

*Dukungan dan semangat dari keluarga tercinta  
Serta teman-teman yang selalu hadir dalam keramaian  
Khusus 'someone' yang banyak memberikan inspirasi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji syukur atas nama Allah Swt Tuhan semesta alam yang memberikan begitu banyak kenikmatan dan suatu anugerah sampai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk itu izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan beserta staf jajarannya, atas segala kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektual penyusun.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasji A Salam, dan Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, koreksi atas penyusunan skripsi ini.
3. Keluargaku tercinta, Bapak Waselan, Ibu Munda'ah, serta seluruh keluarga yang terus mendo'akan dan mengharapkanku.

4. Teman-teman JS-I (Jinayah Siyasah) Angkatan 2000 yang selalu renyah meskipun dalam keadaan susah, juga seluruh Wismawan di “Wisma Sarjana” sahabat terbaik dan tempat terbaik di Jogja.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Konsep Moral Partai Keadilan Sejahtera dengan segala keterbatasannya.

Namun penyusun menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1425 H  
1 Oktober 2004 M

Penyusun



Akhmad Rizano

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
وربّ	ditulis	wa rabbun

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سياسة	ditulis	siyasah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بيعة العقابه	ditulis	Bai'ah al-'aqabah
--------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة	ditulis	Syarrah ad-dābbah
------------	---------	-------------------

### Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā ma
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت	ditulis	Izā' alimat
اهل الحلّ	ditulis	ahl al-hall

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Apabila dilihat secara teliti dan lebih mendalam, tersirat bahwa kehidupan di Indonesia terutama menyangkut masalah sosial politik masih banyak ironi yang terjadi. Pada satu sisi masyarakat kecil yang “tidak tahu menahu” tentang politik sangat skeptis untuk membicarakan politik, karena *image* buruk yang menimpa dan melekat pada dunia politik. Dengan segudang permasalahannya rakyat hanya menyaksikan perebutan kursi kekuasaan yang pada ujung-ujungnya uang dan kekuasaan.

Pada sisi yang lain terlihat bagaimana para politisi sering menghalalkan segala cara untuk memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan, sehingga tidak heran jika yang muncul kemudian adalah politik busuk. Praktik kekerasan, intimidasi, politik uang, korupsi terus menerus mendera wajah politik. Kasak-kusuk politisi busuk mencari “sesuap nasi”, atau intrik-intrik para petualang politik untuk mengeruk uang dan mendapatkan tahta kekuasaan. Gambaran seperti itu merupakan suatu realitas dalam perpolitikan di Indonesia sampai saat ini, yang tentu saja mencederai nilai-nilai moral yang menjadi bagian dari hakikat politik itu sendiri.

Atas situasi dan kondisi tersebut penulis mengalihkan sudut pandang pada satu entitas politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera untuk merefleksikan kondisi tersebut. Dengan komitmen moral untuk menampilkan politik yang santun, bersih dari korupsi dan memihak pada rakyat. Satu partai politik yang menjadi *pilot project* dalam dunia perpolitikan nasional kontemporer sebagai partai modern. Prinsip-prinsip yang menjadi cita-cita normatif merujuk pada al-Qur'an dan sunnah serta diktum-diktum piagam Madinah. Dengan latar belakang kondisi sosial politik Indonesia pada satu sisi, sedangkan komitmen PKS pada politik yang bermoral di sisi lain, menjadikan suatu permasalahan yang menarik untuk kemudian dirumuskan secara sederhana yaitu tentang moral politik yang ingin dibangun oleh PKS dan korelasinya dalam konteks perpolitikan nasional.

Pada penelitian ini lebih tertuju sebagai penelitian pustaka terutama yang berkaitan langsung dengan tema dan objek penelitian, akan tetapi juga disertai dengan penelitian lapangan baik melalui pengamatan maupun wawancara. Sedangkan model pendekatannya adalah normatif dan sosio-historis. Melalui perumusan tersebut di atas, dengan model pendekatan dan analisis tentang dasar pemikiran, prinsip-prinsip dasarnya diketahui bahwa moral politik yang dibangun oleh PKS sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana pandangan dasarnya berangkat dari konsep tauhid, yang berimplikasi pada paradigma holistik dalam hubungannya antara agama dan Negara (*ad-din wa ad-daulah*). Namun lebih dari itu isu-isu dan wacana tentang pemberantasan korupsi melalui komitmen dan bukti konkret, -bukan formalisasi syariat Islam- menunjukkan bahwa PKS pada titik tersebut telah mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam perilaku, dengan kata lain melakukan objektifikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa PKS merupakan partai modern yang substansialis.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoretik.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Sejarah Berdirinya : Dari PK ke PK Sejahtera.....</b>	<b>21</b>
<b>B. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera.....</b>	<b>25</b>
<b>C. Mengenal Jati Diri, Visi, Misi, dan Platform PKS.....</b>	<b>33</b>

1. Visi.....	33
2. Misi.....	34
3. Platform PKS.....	35
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MORAL POLITIK.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Epistemologi Moral, Akhlaq, dan Etika .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Moral, Akhlaq, dan Etika.....	44
a. Moral.....	44
b. Akhlaq.....	48
c. Etika.....	49
2. Peranan Dalam Kehidupan.....	51
a. Agama dan Moral .....	52
b. Moral dan Politik.....	54
<b>B. Agama, Moral, dan Politik.....</b>	<b>57</b>
1. Pemikiran Politik .....	59
2. Moralitas Politik Islam .....	64
<b>BAB IV ANALISIS APLIKASI KONSEPSI MORAL POLITIK PKS..</b>	<b>68</b>
<b>A. Dasar Pemikiran Partai Keadilan Sejahtera.....</b>	<b>68</b>
1. Prinsip Keadilan dan Persamaan .....	76
2. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan .....	83
3. Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan .....	89
4. Prinsip Musyawarah .....	93
<b>B. Kontekstualisasi Nilai-nilai Islam.....</b>	<b>96</b>
1. Budaya Politik Santun .....	99
2. Pemerintahan Bersih dan Peduli .....	103

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN 1:TERJEMAH BAHASA ARAB DAN INGGRIS.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN 2:BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....</b>	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN 3:CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran partai politik di negara manapun mempunyai motif pada kekuasaan, karena bagaimanapun partai sebagai implementasi ilmu politik dalam realitas empiris kehidupan bernegara selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Secara umum Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan tujuan yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankannya secara konstitusional.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertarungan nyata partai politik di dalam dunia politik adalah perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, politik dan kekuasaan sangat identik dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Politik berasal dari kata *politicus* (Latin), *politicos* (Yunani) yang berarti *relating to a citizen*. Kata politik juga dapat ditelusuri dari kata *polis* (Yunani) berarti “negara-kota”.<sup>2</sup> Istilah politik (*politea*) pertama kali ditemukan dalam buku “*Republik*” karya Plato, yang pada intinya membahas tentang bagaimana menjalankan pemerintahan dalam masyarakat politik atau negara-kota secara baik. Namun demikian, politik dalam pengertian yang sempit sering dikatakan sebagai cara-cara untuk memperoleh,

---

<sup>1</sup>Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.XX, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 160.

<sup>2</sup>Victoria Neufild (ed), *Webster's New World College Dictionary*, third edition (New York: Macmillan, 1996), hlm. 1045.

menyelenggarakan dan mempertahankan kekuasaan. Pada posisi inilah politik diartikan sebagai sarana kekuasaan.

Berkaitan dengan moralitas politisi, seringkali dalam mempertahankan ataupun memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan slogan “tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan” ataupun semboyan “tujuan menghalalkan segala cara”, sehingga politik identik dengan “permainan kotor”, termasuk dengan fitnah ataupun *character assassination* untuk menjatuhkan lawan politiknya. Segala daya upaya dilaksanakan hanya untuk mengejar yang namanya kekuasaan, pandangan ini merupakan paradigma Machiavellian. Ketika para politisi tersebut berkuasa maka berlaku sebagaimana adagium dari Lord Acton, “*Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Hal itu mencerminkan betapa dangkalnya moralitas para politisi.

Politik hanya untuk meraih kepentingan sesaat tanpa memikirkan kepentingan umum jangka panjang dan mengarah pada *pragmatisme* dan *opportunisme*. Retorika politik dengan obral janji merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat. Bahkan praktik kekerasan, intimidasi, politik uang (*money politics*) dan korupsi terus menghiasi wajah politik. Perilaku semacam ini jelas sangat mencederai dan tidak mengindahkan kejujuran, kesantunan, keadilan, dan kesejahteraan umum sebagai nilai-nilai moral yang menjadi hakikat politik itu sendiri.

Ketika merefleksikan kembali kehidupan bernegara di Indonesia gambaran tersebut merupakan realitas kasat mata. Contoh terdekat adalah

perebutan kekuasaan pasca reformasi, terlihat jelas antar partai politik berusaha menempatkan politisinya untuk duduk di lingkaran kekuasaan, baik pusat maupun daerah serta pos-pos strategis lainnya untuk mendapatkan sumber-sumber dana bagi partai, dan implikasinya politisi akan berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan berbagai cara, termasuk KKN. Namun tidak sedikit politisi bertindak sebagai pribadi melakukan KKN untuk memperkaya diri sendiri. Banyak kasus yang melibatkan para politisi<sup>3</sup> baik KKN, pelanggaran hukum, kasus penggunaan narkoba dan perilaku yang tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh politisi.<sup>4</sup> Politik hanya dipenuhi dengan janji-janji tanpa realisasi. Akhirnya politik hanya diartikan sebagai perebutan kekuasaan semata tanpa adanya suatu substansi yang mendasar tentangnya.

Perilaku yang buruk tersebut menjadikan *image* di benak masyarakat bahwa politik sangatlah kotor -dengan logika sederhana menyimpulkan- untuk itu para politisi yang ada di dalamnya pastilah orang yang kotor pula, sehingga tidak ada lagi kepercayaan kepada mereka. Krisis kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap politisi maupun partai politik merupakan salah satu problem utama pembangunan demokrasi di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Sebagai contoh, KKN yang melibatkan Ketua dan anggota DPRD di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Banda Aceh, Kota Singkawang. Lihat, "Makin Banyak Pimpinan DPRD Berstatus Tersangka", *Kompas*, edisi 10 Juni 2004, hlm. 1. "DPRD Pontianak Juga Tersandung", *Kompas*, edisi 11 Juni 2004., hlm. 1. berkenaan dengan posisi eksekutif, "Abdullah Puteh Resmi Tersangka Korupsi", *Kompas*, edisi 30 Juni 2004, hlm 1. dan yang belum terungkap.

<sup>4</sup>Gerakan anti politisi busuk membuat kriteria yang masuk dalam daftar politisi busuk yaitu terlibat KKN, pelanggaran HAM berat, perusakan lingkungan,, kejahatan domestik termasuk kejahatan seksual dan terlibat narkoba. Lihat "Ramai-ramai Merumuskan si Busuk", *Tempo*, edisi 12-18 Januari 2004. No. 46/XXXIII/12- 18 Januari, hlm. 24-28.

Secara umum penyebab krisis multi dimensi dan terutama dalam politik kenegaraan ini berpangkal pada satu muara yaitu krisis moral.

Melihat carut marutnya kondisi Indonesia saat ini, Ahmad Syafi'i Ma'arif bahkan mengatakan bahwa kerusakan bangsa ini hampir sempurna.<sup>5</sup> Begitu banyak persoalan bangsa yang berpangkal pada krisis moral, suatu bencana besar akan melanda suatu bangsa apabila telah dihindangi suatu penyakit yaitu krisis moral.<sup>6</sup> Pendapat ini tidaklah berlebihan mengingat moral sebagai parameter yang seharusnya dijadikan pegangan bagi politisi dan masyarakat secara menyeluruh.

Istilah moral berasal dari kata *mores* atau *moralis* (latin) yang berarti tata krama, kelakuan atau adat kebiasaan.<sup>7</sup> Moral merupakan pedoman dalam berperilaku untuk membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah dalam segala aktivitas termasuk berpolitik –dalam pengertian inilah moral politik dipahami. Ajaran moral dapat bersumber dari tradisi, ajaran agama, adat istiadat, ataupun ideologi-ideologi tertentu.<sup>8</sup>

Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi kesenjangan bahkan pertentangan antara realitas politik dan sumber ajaran moral –agama. Fenomena tersebut bersumber pada dua sebab, *pertama* terdapat perbedaan

---

<sup>5</sup>“Demokrasi Memang Melelahkan”, *Kompas*, edisi 21 Februari 2004, nomor 230 tahun ke-39, hlm. 8.

<sup>6</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 174.

<sup>7</sup>Victoria Neufeld (ed), *Webster's New World College Dictionary*, third edition (New York: Macmillan, 1996), hlm. 881.

<sup>8</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar : Pokok-pokok Masalah Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 14.

konseptual antara agama dan politik yang menimbulkan kesulitan dalam praktiknya. *Kedua*, terdapat penyimpangan praktik politik dari etika dan moral agama.<sup>9</sup>

Dari asumsi tersebut jelas apabila suatu bangsa dilanda krisis moral, maka mengindikasikan masyarakat dan para politisinya ataupun pemegang kekuasaan sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah, serta telah terjadi penyimpangan dari sumber ajaran moral tersebut. Terdapat suatu keterkaitan antara politik dan moral, di mana politik dengan ralitas empiris sebagai partai politik dan politisi pada satu sisi diharapkan memberikan teladan bagi pembangunan bangsa yang bermoral.<sup>10</sup>

Dalam studi ini berusaha untuk mengkaji hubungan politik dan moral dalam realitas empirisnya berkenaan dengan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera.<sup>11</sup> Dengan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku politik dan individu yang bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi basis keteladanan,<sup>12</sup> diharapkan dengan landasan moral yang bersih,

---

<sup>9</sup>M Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam". *Ulumul Qur'an*. Nomor 2, Vol. IV, Th. 1993., hlm. 4-5.

<sup>10</sup>Dalam paradigma politik Islam pra modern terdapat hubungan antara politik dan agama yang bersifat simbiosis dimana agama membutuhkan legitimasi politik untuk berkembang dan bertahan sementara politik membutuhkan agama sebagai landasan moral bagi perkembangannya. Lihat M Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 6.

<sup>11</sup>Partai Keadilan Sejahtera merupakan modifikasi dari Partai Keadilan yang sebelumnya telah mengikuti pemilu 1999 namun tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold*. dalam "Profil Partai Peserta Pemilu 2004", *Kedaulatan Rakyat*, edisi 17 Desember 2003, hlm.16

<sup>12</sup>DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan* (Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998), hlm.29

sehingga perilaku dan aktivitas partai yang dikembangkan tersebut tidak mengalami deviasi dari tujuannya.<sup>13</sup>

Dalam anggaran dasar (AD) bab II pasal 5, Partai Keadilan Sejahtera bertujuan mewujudkan negara dan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah Swt.<sup>14</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam ART bab II pasal 2 point 1, maka dirumuskan sasaran: 1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 2. Tegaknya ‘masyarakat Islami’ yang memiliki kemandirian berdasarkan konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Secara teknis tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam agenda nasional dan kebijakan dasar partai yang merupakan bagian integral dari AD/ART. Adapun agenda nasional dan platform utama PKS adalah “pemerintahan bersih dan peduli”, dalam artian pemerintahan yang bersih dari KKN dan peduli terhadap nasib rakyat kecil,<sup>15</sup> sebagai contoh adalah larangan dari DPP PKS kepada anggota legislatif baik pusat maupun daerah untuk menerima uang suap, dan uang pesangon purna bakti. Sedangkan salah satu kebijakan dasarnya adalah budaya politik, contoh konkret budaya ini adalah kampanye yang damai, tertib, dan aman, yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

---

<sup>13</sup>Harun Salim HS, *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm.168.

<sup>14</sup>DPP PKS, “AD/ART Partai Keadilan Sejahtera”, tahun 2002, tidak diterbitkan.

<sup>15</sup>DPP PKS, *Agenda Penyelamatan Bangsa : Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta: Tim Pemenangan Pemilu 2004 DPP PKS, 2003), hlm. iii.

Landasan pemikiran dan perjuangan PKS tercantum dalam AD bab I pasal 2 yang menyebutkan Islam sebagai azas partai, -yang dalam pengertian sederhana dapat dikatakan sebagai ideologi partai. Sementara prinsip-prinsip partai yang memuat cita-cita normatifnya, mengambil nilai-nilai dalam al-Quran dan sunnah, serta merujuk pada Piagam Madinah seperti keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan dan musyawarah. Dari uraian tersebut menunjukkan keinginan untuk menegakkan kembali moral dan etika Islam dalam berpolitik yang menjadi kerangka konsepsi moral politiknya.

Islam mempunyai sifat “*omnipresence*” yaitu hadir dimana-mana, dengan sifatnya itu kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.<sup>16</sup> Kekuasaan menurut ajaran Islam adalah amanah Allah Swt sebagai penjelmaan misi kekhalifahan manusia di muka bumi dan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan, kekuasaan bersifat *mas'uliyah* (*responsibility*) dan amanah (*credibility*) serta berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat.<sup>17</sup> Islam sebagai landasan moral dalam berpolitik merupakan pemikiran yang sudah lama berkembang dalam khazanah pemikiran Islam.

Dalam al-Quran menyediakan dasar-dasar yang kokoh dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan, dan

---

<sup>16</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 345.

<sup>17</sup>“Ingat Kriteria Kepemimpinan Nasional Versi Majelis Tarjih”, *Suara Muhammadiyah*, no. 06 Th Ke-89 edisi 16-31 Maret 2004. hlm. 7.

perhatian al-Quran ialah agar masyarakat ditegakkan di atas keadilan dan moralitas, berdasarkan hal tersebut pemikiran politik Islam dibangun.<sup>18</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Konsepsi moral politik merupakan hasil kajian politik dalam realitasnya menyangkut persoalan-persoalan agama, filsafat dan fenomena perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat, dalam konteks ini realitas sosio-kultural mempengaruhi pengembangan dan implementasinya dalam kehidupan kenegaraan.

Dari asumsi tersebut studi ini berusaha untuk membahas permasalahan moral politik yang berkaitan dengan komitmen Partai Keadilan Sejahtera yang dirumuskan dalam pokok masalah :

- a. Bagaimanakah konsepsi Partai Keadilan Sejahtera tentang moral politik?
- b. Bagaimanakah relevansinya dengan konteks perpolitikan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian ini mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitiannya.

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan :

---

<sup>18</sup>Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 18.

- a. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komitmen moral politik yang menjadi pedoman bagi aktivitas dan perilaku anggota maupun simpatisan Partai Keadilan Sejahtera serta dari sisi pemikiran politik Islam.
  - b. Menjelaskan relevansi maupun kontribusi dalam perpolitikan Indonesia berkenaan dengan moralitas politik yang ingin dibangun oleh Partai Keadilan Sejahtera
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai suatu penelitian berusaha memberikan kontribusi bagi fakultas syariah dan khalayak umum yang berkompeten dengan studi mengenai partai politik dan pemikiran politik Islam.
  - b. Bagi pemerhati dan peminat kajian politik, studi ini sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan politik, terutama sekali untuk mendorong terciptanya suatu iklim politik yang kondusif dan lembaga-lembaga politik yang lebih bermoral dan beretika.

#### **D. Telaah Pustaka**

Seringkali suatu penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek ataupun tema tersebut dan urgensi terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian.

Skripsi Ali Said Damanik pada FISIP UI dengan judul “Transformasi Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia: Studi tentang

Gerakan Dakwah Kampus Menjadi Partai Keadilan” yang telah dibukukan dengan judul “Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia”<sup>19</sup>, memfokuskan penelitiannya pada sisi sosio-historis kelahiran partai keadilan yang berawal dari gerakan tarbiyah selama lebih dua puluh tahun dan dakwah kampus melalui komunitas halaqah.

Skripsi Muhammad Isa pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, “Partai Keadilan dalam Perspektif Politik Islam: Studi atas AD/ART partai Keadilan”.<sup>20</sup> Studi ini menganalisa AD/ART Partai dan memetakan konsepsi partai dalam konteks relasi Islam dan negara<sup>21</sup> yang memberikan kesimpulan bahwa partai keadilan menempatkan Islam dan negara sebagai satu kesatuan.

Skripsi Yadi kurniadi pada fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, “Komunikasi Politik Islam: Studi analisis Dakwah Politik PK DIY”.<sup>22</sup> Studi ini berusaha memberikan gambaran tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh Partai Keadilan dalam wilayah Yogyakarta.

---

<sup>19</sup>Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. (Jakarta: Teraju, 2002).

<sup>20</sup>Muhammad Isa, “Partai Keadilan Dalam Perspektif Politik Islam: Studi Atas AD/ART Partai Keadilan”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2001.

<sup>21</sup>Di kalangan pemikir Islam terdapat tiga *mainstream* berkenaan dengan hubungan Islam dan negara. *Pertama* pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat bernegara, *kedua* pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, Islam tidak mengatur secara spesifik tentang kehidupan kenegaraan, hanya saja terdapat tata nilai dan etika dalam urusan bernegara. Lihat. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, cet.V (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.1-2.

<sup>22</sup>Yadi Kurniadi, “Komunikasi Politik: Studi Analisis Dakwah Politik PK DIY”, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2001.

Aay Muhammad Foerkon, dalam bukunya "*Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*",<sup>23</sup> mencoba menelusuri tentang PKS dari sisi ideologi yang mempengaruhinya, terutama adalah al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir, serta korelasi ideologi dengan praksis politik di Indonesia.

Skripsi Maryam pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, "Visi Politik Islam dalam Bernegara (Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)", dalam studi ini hanya menggambarkan visi keduanya dalam kehidupan kenegaraan, belum menyentuh pada tataran moral politik yang dikembangkan Partai Keadilan Sejahtera secara spesifik.<sup>24</sup>

Skripsi Syifa'urrohman Dahlan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, "Profil Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah". penelitian tersebut hanya mengulas tentang kriteria kepala Negara menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam perspektif fiqh siyasah, terutama dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2004.<sup>25</sup>

Dari berbagai macam penelitian dalam studi tersebut di atas, belum ada yang membahas secara spesifik tentang konsepsi moral politik Partai Keadilan Sejahtera, dan dari sinilah penyusun mencoba memberikan

---

<sup>23</sup>Aay Muhammad Foerkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Teraju, 2004).

<sup>24</sup>Maryam, "Visi Politik Islam dalam Bernegara (Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2004.

<sup>25</sup>Syifa'urrohman Dahlan, "Profil Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Fiqh Siyasah", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan., tahun 2004.

warna lain tentang Partai Keadilan Sejahtera dalam sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam suatu problematika kehidupan, seringkali tidak berdiri sendiri tanpa adanya *interdependensi* dengan aspek kehidupan yang lain, dan begitu pula dalam suatu penelitian pastilah ada keterkaitan antara satu tema kajian dengan sisi kajian yang lain. Berkaitan dengan tema yang menjadi kajian dalam penelitian ini, penulis berusaha melihat dari berbagai sudut pandang. Adakalanya suatu teori digunakan untuk melihat lebih dekat objek, sedangkan teori yang lain digunakan untuk meneliti lebih dalam membedah ataupun sebagai pisau analisa.

Terdapat dua model pendekatan dalam ilmu politik: 1. Pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan berbagai fenomena politik. Legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-lembaga negara serta tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifat analitis historis, legal institusional dan normatif deskriptif.

2. Pendekatan yang berupaya menganalisis gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara sistematis berdasarkan pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teori yang terperinci dan ketat yang

dinamakan pendekatan *behavioral* yang lebih fokus pada perilaku politik daripada lembaga-lembaga, kekuasaan ataupun keyakinan politik.<sup>26</sup>

Ranah pemikiran politik Islam terutama masa klasik memiliki beberapa kecenderungan, secara spesifik diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Kecenderungan hukum (*juristic trend*) dalam pemikiran ini mengajukan teori legitimasi dari sudut pandang hukum Islam yang mengedepankan aspek legalitas;
2. Kecenderungan administratif-birokratis (*bureaucratic trend*) menekankan pada kerangka pemerintahan atau institusional kelembagaan dan penekanan pada fungsionalisasi aparatur pemerintahan;
3. Kecenderungan filosofis (*philosophic trend*) menekankan pada kerangka ideal dari sebuah pemerintahan Islam;
4. Kecenderungan *ethis* yang menekankan aspek normativitas nilai-nilai moralitas dalam perilaku politik.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam pendekatan filsafat, studi tentang moral mempunyai beberapa teori yaitu etika normatif, etika deskriptif dan metaetika. Etika deskriptif berusaha menjelaskan pengalaman moral dengan cara deskriptif, mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan sesuatu tindakan dalam kelakuan manusia. Pada etika deskriptif ini berusaha membedakan “apa yang ada” dengan “apa yang harus ada”. Etika normatif lebih menekankan pada tentang apa yang seharusnya dilakukan (*should behave*) atau keharusan (*the ought*) untuk menentukan suatu perbuatan dan membuat evaluasi

---

<sup>26</sup>Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar.*, hlm.4-5.

<sup>27</sup>M Sirajudin Syamsuddin “Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan Dalam Sistem Pemikiran Islam)” dalam Ihsan Ali Fauzi, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution* (Jakarta: LSAF, 1989), hlm. 244-249.

keputusan-keputusan tentang baik dan buruk, benar atau salah. Pada intinya merupakan pilihan dan penilaian. Sedangkan metaetika memusatkan perhatian pada analisis, arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika.<sup>28</sup> secara garis besar metaetika mempunyai dua aspek yaitu: 1. Concern pada definisi terma tentang etika itu sendiri; 2. Menguji dan mengkritisi dasar-dasar pokok sistem etika.<sup>29</sup>

Pertautan antara agama, filsafat dan sosio-politik dalam dataran praktiknya tidak bisa dilepaskan dari pelaku politik itu sendiri yaitu manusia. Salah satu misi penciptaan manusia oleh Allah SWT dijadikannya manusia sebagai “penguasa” dimuka bumi.<sup>30</sup> Sehingga jelaslah bahwa manusia diberikan wewenang sebagai pengemban “amanah peradaban”, untuk itu keberadaannya dimuka bumi haruslah membawa kemashlahatan bagi sekalian alam. Kekuasaannya bisa diimplementasikan dalam arena politik namun harus dengan suatu panduan moral yang bersendikan pada agama karena ia akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Oleh karenanya berpolitik dan menjalankan kekuasaan para politisi dan pemegang kekuasaan harus berbuat adil dan amanah terhadap wewenang yang menjadi tugasnya.

Amanah dan keadilan merupakan tema pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy wa ar-*

---

<sup>28</sup> Harold H Titus, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa. H M Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21-22.

<sup>29</sup> Anthony F. Falikowski, *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 92-93.

<sup>30</sup> Al-Baqarah (2): 30.

*Ra'iyah*,<sup>31</sup> sebagaimana dijelaskan oleh Suyuthi Pulungan<sup>32</sup> bahwa amanah dan keadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bila amanah dilaksanakan maka keadilan akan terwujud.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا

بالعدل<sup>33</sup>

Maka wajiblah para pemegang kekuasaan melaksanakan amanah dan adil dalam menjalankan tugas-tugasnya dan begitu juga rakyat haruslah patuh terhadap pemerintahan yang demikian.

ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم<sup>34</sup>

M. Amien Rais dalam bukunya “*Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*”, dengan paradigma fungsional struktural menjelaskan bahwa politik berfungsi sebagai alat untuk berdakwah, sehingga berpolitik harus sesuai dengan nilai-nilai dalam berdakwah.

Moralitas dan etika kegiatan berdakwah dalam bidang apapun harus bersumber pada tauhid, sehingga moralitas dan etika politisi Islam juga harus bersandar pada tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid dilepaskan dari politik, maka politik akan berjalan tanpa arah dan membawa pada kesengsaraan orang banyak.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyat* (Kairo: Dar Al Quthb, 1984), terjemahan oleh Rofi' Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Baca juga, Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah* (New Delhi: Adam Publisher, 1992).

<sup>32</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, cet.III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.272-275.

<sup>33</sup>An-Nisa' (4): 58.

<sup>34</sup>An-Nisa' (4): 59.

<sup>35</sup>M Amien Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 28.

Lebih lanjut Amien menuliskan, politik yang berpedoman pada moral dan etika tauhid merupakan aktualisasi nilai-nilai Islam. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dalam politik tersebut; *Pertama*, syura dengan setiap penguasa harus melaksanakannya dengan umat berkaitan menyangkut masalah umum. *Kedua*, keadilan yang merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam dan seluruh aspek sosial kehidupan yang lain. *Ketiga*, kebebasan atau kemerdekaan, bahwa akar dari kebebasan ini adalah kebebasan berpikir dan Islam menganggap kebebasan berpikir ini mutlak bagi manusia. *Keempat*, persamaan sebagai prinsip menjunjung tinggi harkat manusia dihadapan hukum tanpa diskriminasi, persamaan dalam arti legal. *Kelima*, sebagai akhir dari evaluasi tindakan manusia adalah pertanggungjawaban, dalam pandangan Islam penuntutan terhadap penguasa yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dibenarkan.<sup>36</sup>

Semua prinsip atau nilai tersebut harus diterjemahkan dalam kehidupan kenegaraan maupun individu dalam masyarakat sebagai konsep tauhid sosial.<sup>37</sup> Elaborasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan meminjam teori Kuntowijoyo, yang dalam paradigma transformatif sebagai objektifikasi,<sup>38</sup> dalam arti nilai-nilai tersebut telah menghasilkan perbuatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum dalam segala aspek kehidupan. Di samping itu, ia

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>37</sup>Berkaitan dengan konsep tauhid sosial ini, baca. M Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>38</sup>Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 65.

juga menggunakan al-Qur'an sebagai paradigma, dalam hal ini paradigma sesuai yang dipahami oleh Thomas Kuhn bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula.<sup>39</sup> Pendekatan yang digunakan adalah sintetik analitik.

Bagaimana agar nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan? Pada dasarnya nilai-nilai Islam seluruhnya itu bersifat normatif, untuk itu ada dua cara dalam mentransformasikan hal tersebut menjadi sesuatu yang operasional; 1. Nilai-nilai normatif diaktualkan langsung menjadi perilaku. 2. Mentransformasikan nilai-nilai normatif menjadi teori ilmu sebelum diaktualisasikan ke dalam perilaku.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah maka dibutuhkan metode yang akan mengarahkan dan sekaligus menjadi pedoman penulisan penelitian tersebut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka (*library research*) karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, tulisan-tulisan, buletin, jurnal dan

---

<sup>39</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 327.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 167.

dokumen yang lainnya,<sup>41</sup> terutama yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera, juga dilengkapi dengan adanya penelitian lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang objek studi, dalam hal ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan analitis berusaha menganalisa data-data untuk mendapatkan suatu penjelasan yang komprehensif terhadap konsepsi moral politik PKS yaitu tentang dasar pemikiran, prinsip-prinsip yang memuat cita-cita normatifnya dan juga perilaku dalam konteks perpolitikan di Indonesia.

## 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *sosiologis*. Maksud dari pendekatan normatif tersebut adalah suatu usaha untuk menggali nash-nash al-Qur'an dan hadits yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian serta kaitannya dengan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak.

Pendekatan sosiologis yaitu untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi serta fenomena sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, menyangkut praktik politik dan kekuasaan.

## 4. Sumber data

Adapun sumber data untuk penelitian ini dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan langsung dengan objek penelitian

---

<sup>41</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.145.

dalam hal ini buku *Sekilas Partai Keadilan*<sup>42</sup> dan *Agenda Penyelamatan Bangsa : Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*.<sup>43</sup> Sedangkan data yang menjadi rujukan yang lain merupakan data sekunder.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diklasifikasi sesuai dengan urgensitasnya kemudian dianalisis. Teknik yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena umum yang kemudian ditarik dalam kesimpulan partikulatif, sebagai analisis dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang memuat cita-cita normatif Partai Keadilan Sejahtera, yang dalam penelitian sebagai pola *deduktif-normatif*.

Induktif dengan cara menguraikan suatu persoalan secara khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan umum.<sup>44</sup> Teknik ini digunakan dalam aplikasi moral politik pada konteks perpolitikan di Indonesia yang menyangkut objektifikasi nilai-nilai Islam, melalui praksis politik yaitu “budaya politik santun” dan “Pemerintahan bersih dari KKN dan peduli pada rakyat kecil”. Biasanya memiliki pola *induktif-empiris*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang korelatif dengan isi. Pada

---

<sup>42</sup>DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan* (Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998).

<sup>43</sup>DPP PKS, *Agenda Penyelamatan Bangsa : Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Tim Pemenangan Pemilu 2004 DPP PKS, 2003)

<sup>44</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986), I: 36.

bab pertama yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah sebagai uraian tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut moralitas politik kemudian dilanjutkan dengan rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitan dengan orisinalitas penelitian, dan pengembangan teori sebagai kerangka yang digunakan, metode penelitian digunakan sebagai arahan dan pedoman serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran utuh tentang profil partai keadilan sejahtera yang dimulai dari sejarah berdirinya partai, dipertegas dengan visi-misi serta karakteristik partai keadilan sejahtera yang menjadikan perbedaan dengan partai politik yang lain serta platform kebijakan partai.

Bab ketiga tentang gambaran umum moral politik secara garis besar dimulai dari sub bab pertama epistemologi moral, akhlak dan etika yang berisi pengertian dan peranan dalam kehidupan. Sub bab kedua berkenaan agama dan moral sebagai dasar politik.

Bab keempat merupakan aplikasi konsepsi moral politik partai keadilan sejahtera yang berisi sub bab pertama yaitu dasar pemikiran, prinsip-prinsip dasar partai dan sub bab kedua relevansinya dengan konteks perpolitikan Indonesia.

Bab kelima yang merupakan penutup dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya ada beberapa catatan sebagai kesimpulan yang dapat penyusun sampaikan atas pokok masalah yang telah dikemukakan di awal dan terutama analisis mengenai Partai Keadilan Sejahtera, yang dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi moral politik dan relevansinya dengan perpolitikan di Indonesia.

1. Setelah menelusuri berbagai pandangan dari para pemikir politik Islam dan juga pendirian PKS dalam berbagai aspek, diperoleh kesimpulan bahwa konsepsi moral politik yang dibangun PKS bersumber pada al-Qur'an dan hadits, sehingga sesuai ajaran Islam. Moral politik sebagai suatu wacana dan sekaligus hakikat politik tentunya menyangkut aspek-aspek normatifitasnya, dalam hal ini yaitu agama, moral dan tradisi, agama tetap menjadi landasan terbaik bagi moral politik. Di samping bersumber dari al-Qur'an dan hadits, dapat dikemukakan terdapat empat pilar konsepsi moral politik tersebut; a. Dasar pemikiran PKS yang termaktub dalam anggaran dasar (AD) bab I pasal 2, yaitu tentang Islam sebagai azas partai, yang berawal dari Konsep Tauhid. Konsep ini berpengaruh terhadap dasar pemikiran PKS, terutama mengenai pandangan Islam sebagai sistem yang intregral antara dunia dan akhirat, agama dan Negara (*ad-din wa ad-daulah*) dan menjadikan Islam sebagai ideologinya; b.

Piagam Madinah. Dalam banyak hal menjadi rujukan dalam prinsip-prinsip PKS yang memuat cita-cita normatif dan landasan aktivis partai. Prinsip-prinsip itu meliputi prinsip keadilan dan persamaan, persatuan dan persaudaraan, kebebasan dan kemerdekaan dan musyawarah; c. Tujuan dan sasaran partai yang tercantum dalam AD/ART; d. Agenda nasional dan kebijakan dasar PKS sebagai teknis operasional yang merupakan bagian integral dari AD/ART PKS.

2. Dalam korelasinya dengan konteks perpolitikan di Indonesia, moral politik tersebut relevan dengan kondisi dan situasi politik nasional, seperti diketahui bahwa politik di Indonesia masih diwarnai dengan praktik kekerasan, politik uang, intimidasi, dan korupsi. Untuk itu dalam usahanya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam politik, dalam hal ini menyangkut agenda nasional dan kebijakan dasar PKS, dengan melalui suatu objektifikasi. Objektifikasi nilai-nilai ini berkaitan dalam dua hal: a. Budaya politik santun, yang berusaha untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, rasional, demokratis, serta mencegah penggunaan kekerasan, intimidasi dalam berpolitik; b. Pemerintahan yang bersih dan peduli. Fokus dari permasalahannya adalah pemberantasan KKN, bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia ini.

## B. Saran

1. Sebagai suatu fenomena sosial politik, tentunya sebuah partai dalam proses dinamis dan berkembang, bukan *taken for granted*. Salah satu *concern* PKS dalam hal ini adalah pemberantasan KKN, untuk itulah

diperlukan satu ketegasan, integritas dan keteladanan dalam usaha menciptakan pemerintahan yang bersih dan peduli.

2. Dalam proses demokratisasi di Indonesia peranan suatu partai sangat signifikan, karenanya PKS harus menjadi katalisator yang mempercepat tumbuhnya iklim demokrasi itu sendiri, dan tidak menjadi kontra produktif terhadap wacana semacam demokratisasi. Lebih lanjut, ia tidak harus kehilangan jati diri dan karakteristiknya dalam pusaran arus politik yang sangat pragmatis dan “kotor”.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1999.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*, XVI, Beirut: Dar al- Fikr, 1974..

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Kelompok Fiqh

Ahmad, Zainal Abidin. *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyah* Kairo: Dar Al Quthb, 1984., terjemahan oleh Rofi' Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

“Ingat Kriteria Kepemimpinan Nasional Versi Majelis Tarjih”. *Suara Muhammadiyah*, no. 06 Th Ke-89 edisi 16-31 Maret 2004.

Karim, M Rusli. *Islam dan Konflik Politik Orde Baru*, Yogyakarta: MW Mandala, 1992.

Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. cet.III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

\_\_\_\_\_. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Qomaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*, New Delhi: Adam Publisher, 1992.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet.V, Jakarta: UI Press, 1993.

Syamsudin, M. Din. *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2000.

\_\_\_\_\_, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam sejarah Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, nomor 7, Vol. IV, Th. 1992.

Syamsuddin, M. Sirajudin. "Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan Dalam Sistem Pemikiran Islam)" dalam Ihsan Ali Fauzi, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: LSAF, 1989.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru*, Jakarta: GIP, 1996.

Toprak, Binazz. *Islam and Political Development In Turkey*, Leiden: E.J. Brill, 1981.

### C. Kelompok Akhlaq dan Etika

Amin, Ahmad. *Akhlaq*, alih bahasa Farid Ma'ruf, Bandung: Pustaka, 1997.

Bertens, K. *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Djatnika, Rahmat. *Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.

Falikowski, Anthony F. *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Fakhry, Majid. *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyudin Baidhaw, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Gazali, Muhammad Abdul Hamid. *Inya Ulum ad Din*, juz III, Semarang: Toha Putra, t.t.

Hadiwardoyo, Purwa. *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jafri, Syed Hussain Mohammad. *Moralitas Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Al-Maududi, Abul A'la. *Moralitas Islam*, alih bahasa, A Rahman Zainuddin, Jakarta: Publicita, 1971.

Muhaimin, Yahya A. "Etika Pembangunan Politik" dalam Machnun Husein (ed), *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Muslehuddin, Muhammad. *Morality; Its Concepts and Role In Islamic Order*, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1998.

Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar : Pokok-pokok Masalah Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Suseno, Frans-Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. VII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

#### D. Lain-lain

"Abdullah Puteh Resmi Tersangka Korupsi". *Kompas*, edisi 30 Juni 2004.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Balda, Samsul, Ridho, Abu, Wahono, Untung. *Politik Da'wah Partai Keadilan* Jakarta: DPP PK, 2000.

Budiardjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. XX, Jakarta: Gramedia, 2001.

Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju, 2002.

"Demokrasi Memang Melelahkan", *Kompas*, Edisi 21 Februari 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Balai Pustaka, 1988.

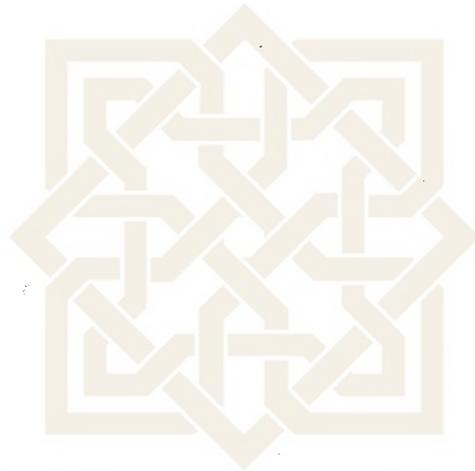
"DPRD Pontianak Juga Tersandung". *Kompas*, edisi 11 Juni 2004.

- DPP Partai Keadilan. *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998.
- DPP PKS. *Agenda Penyelamatan Bangsa : Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: Tim Pemenangan Pemilu DPP PKS, 2003.
- Foerkon, Aay Muhammad. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, I, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Huwaydi, Fahmy. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan Publisers, 1994.
- “Kami Menginginkan Kepemimpinan Nasional yang Baru”. *Tempo*, edisi 12-18 April 2004.
- Kebijakan Dasar. “<http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=kdasar>.” akses pada tanggal 16 Juni 2004.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- ”Makin Banyak Pimpinan DPRD Berstatus Tersangka”. *Kompas*, edisi 10 Juni 2004.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Neufild, Victoria, (ed). *Webster's New World College Dictionary*, third edition, New York: Macmillan, 1996.

- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Pamflet PKS, *Sekilas Jati Diri PK Sejahtera*, Yogyakarta, 2003.
- Partai Peserta Pemilu 2004. "[http://www.kpu.go.id/partai\\_partai?nourut](http://www.kpu.go.id/partai_partai?nourut)." akses tanggal 25 Juli 2004.
- "Profil Partai peserta Pemilu 2004", *Kedaulatan Rakyat*, edisi 17 Desember 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Anatomi Masyarakat Islam*, terjemah, Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1985.
- Rais, M Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Politik Internasional Dewasa Ini*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- "Ramai-Ramai Merumuskan Si Busuk". *Tempo*, edisi 12-18 Januari 2004.
- Rasyid, Daud. *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Salim HS, Harun. *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sanit, Arbi. *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa depan Peradaban Muslim*, terjemah. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1993.
- Sejarah PKS. "<http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah>." akses pada tanggal 16 Juni 2004.
- Suseno, Franz-Magnis. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Titus, Harold H. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa. H M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Voll, John O. "Renewal and Reform In Islamic History : Tajdid and Ishlah"  
dalam John L. Esposito (ed), *Voices of Resurgent Islam*, New York:  
Oxford University Pers, 1983.

WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAH BAHASA ARAB DAN INGGRIS

<b>BAB I</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	15	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2	15	34	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.
<b>BAB II</b>			
3	31	22	Meskipun istilah Islah ini seringkali diterjemahkan sebagai "reformasi", istilah tersebut dan kata lain yang berhubungan memiliki suatu perasaan kebenaran moral yang kuat sebaik perasaan yang menentukan keadaan demi kepentingan perbaikan yang efektif. Perasaan ini adalah bagian dari penggunaan istilah dan kata-kata yang terhubung di dalam al-Qur'an dan juga membantu menggambarkan sifat reformasi yang ada dalam tradisi Islam. Islah secara langsung terhubung dengan pertanyaan dari garis panjang para utusan Tuhan yang bekerja menjelaskannya dalam al-Qur'an.
<b>BAB III</b>			
4	66	42	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
5	66	43	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.
6	67	44	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya jkamu mendapat rahmat.
7	67	45	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.
8	67	46	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

BAB IV			
9	73	13	Esensi dari Tauhid sebagai suatu ide kerja adalah persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Negara, dalam pandangan Islam adalah satu usaha untuk mentransformasikan prinsip-prinsip ideal tersebut menjadi kekuatan ruang waktu, suatu inspirasi untuk membuat negara menjadi satu organisasi manusia yang jelas.
10	76	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
11	77	21	Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsukarean ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) dan enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
12	78	25	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
13	82	35	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
14	82	36	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.
15	85	40	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.
16	86	41	Dan berpegangteguhlah kamu semuanya epada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika dulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.
17	86	42	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena

			itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya jkamu mendapat rahmat.
18	91	47	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.
19	95	52	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
20	98	54	Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman dan tenteram, rezekinya dating kepadanya melimpah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan , disebabkan apa yang mereka perbuat.
21	99	56	Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memeperdayakan melainkan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Beliau dilahirkan di Haran, Suriah pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun sebelum Baghdad jatuh ke tangan Tartar dan wafat pada tahun 1327 M. Ayahnya Abu al-Muhsin Abdul Halima adalah seorang ulama terkenal dari mahdzab Hambali.

Sebagai seorang ulama yang mempelajari fiqh terutama mahdzab Hambali, ia juga belajar ilmu-ilmu al-Qur'an dan teologi. Memiliki pandangan yang luas dan tajam, berani dan menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Beliau hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dekandensi moral, dan keterpurukan dalam banyak hal. Ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemimpin Madrasah Dar al Hadits as Sukkaniyah.

Karyanya yang telah dihasilkan, terutama yang menjadi rujukan di dunia politik Islam adalah *al-siyayat al-syar'iyat fi Ishlah Raiy wa al raiyyat*. Dalam kitabnya tersebut yang menjadi sentral pembicaraan Ibnu Taimiyah yaitu tentang amanat dan perbuatan adil seorang penguasa yang harus dijalankan kepada siapa saja. Beliau ingin memperbaiki kondisi masyarakatnya yang bobrok dalam segala aspek kehidupan, asumsinya bahwa kebobrokan yang terjadi di dalam suatu masyarakat berangkat dari kebobrokan dari para penguasa yang memegang amanat rakyat. Beberapa karya yang lain, *Majmu' al-Fatawa, Minhaj al-Sunnah, Syarh al-Aqidah al-Fiqhiyyah*.

### 2. KUNTOWIJOYO

Beliau merupakan staf pengajar pada Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, serta di pascasarjana pada Universitas yang sama. Dilahirkan di Yogyakarta, 18 Septemeber 1943, menyelesaikan sarjananya di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, UGM, pada 1969. gelar MA-nya diperoleh dari Universitas Connecticut, USA, sementara gelar Ph.D dalam studi sejarah diperolehnya dari Universitas Columbia pada 1980, dengan disertasi berjudul *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1890-1940*.

Sejak Mahasiswa Aktif di organisasi, semacam HMI dan juga salah seorang anggota lembaga kajian *Limited Group* di bawah bimbingan Mukti Ali. Sebagai seorang cendekiawan muslim beliau aktif menulis sampai sekarang, beberapa kumpulan tulisannya pernah diterbitkan, dengan judul *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Shalahudin Press, Yogyakarta, 1985), *Budaya dan Masyarakat* (PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987). Juga kaya dengan gagasan segar terutama sekali adalah ide objektifikasi nilai-nilai Islam dan gagasan tentang Ilmu Sosial Profetis yang dikemukakan dalam tulisannya, *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi* (Mizan, Bandung, 1991), *Identitas Politik Umat Islam* (Mizan, Bandung, 1997) dan yang lainnya.

Selain sebagai sejarawan terkemuka, juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Pada 1986, cerpennya yang berjudul *Dilarang mencintai Bunga-*

*bunga* memperoleh hadiah pertama dari majalah Sastra. Naskah dramanya, *Rumput-rumput Danau Bento*, memenangkan hadiah harapan dari BPTNI, naskah yang lainnya, *Topeng Kayu*, pernah mendapatkan hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta (1973). Sementara novel-novelnya yang telah terbit adalah *Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari* (1966), *Pasar* (1972), dan *Khotbah di Atas Bukit* (1976), juga kumpulan puisinya adalah *Isyarat* dan *Suluk Awang-Uwung*.

### 3. M. AMIEN RAIS

Lahir di Surakarta, pada 26 April 1944, yang dikenal luas sebagai pakar politik yang juga menjadi salah seorang “tokoh reformasi” tahun 1998. menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional, UGM pada tahun 1968. Di samping juga meraih gelar sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1969. Gelar MA-nya di raih pada tahun 1974 di University of Notre Dame, USA, dan memperoleh *Certificate on East European Studies* dari Universitas yang sama. Sedangkan gelar Doktor Ilmu Politik diraihnya dari University of Chicago, USA, pada 1981 dengan disertasi yang membahas “Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir”. Selain sebagai pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL, UGM sejak 1970, juga mengajar di Pascasarjana Universitas yang sama.

Sebagai seorang cendekiawan muslim, melahirkan ide-ide cemerlang pada masanya yaitu tentang *High Politics* dan juga Tauhid Sosial. Aktif menulis, untuk menyebut beberapa diantara karya yang telah diterbitkan adalah *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Mizan, Bandung, 1987), *Politik Internasional Dewasa Ini* ((Usaha Nasional, Surabaya, 1989), *Timur Tengah dan Krisis Teluk* (Ampress, Surabaya, 1990), *Keajaiban Kekuasaan* (Bentang budaya-PPSK UGM, 1994), *Demi Kepentingan Bangsa* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997), *Refleksi Amien Rais: Dari Persoalan Semut Sampai Gajah* (GIP, Jakarta, 1997), *Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Presiden* (Titian Ilahi, Yogyakarta, 1997), *Sukses dan Keajaiban Kekuasaan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997), *Tauhid Sosial: Formula Mengempur Kesenjangan* (Mizan, Bandung, 1998).

Semasa Mahasiswa aktif di IMM dan Juga HMI cabang Yogyakarta. Duduk di lingkaran PP Muhammadiyah sejak 1985, sebagai Ketua Majelis Tabligh, sebagai Wakil PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-42 di Yogyakarta, 1990. kemudian mengantarkannya menduduki Posisi sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-43 di Aceh, 1995-2000. Namun reformasi menjejalkan kakinya di dunia politik praktis, sejak 1998 dengan mendirikan PAN (Partai Amanat Nasional) bersama lembaga MARA. Terpilih sebagai ketua MPR periode 1999-2004, serta menjadi capres pada Pemilihan Presiden, 5 Juli 2004.

### 4. NURCHOLIS MADJID

Dilahirkan di Jombang, 17 Maret 1939. alumni KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960), melanjutkan studinya di IAIN Jakarta pada Fakultas Adab, tahun 1968. meraih gelar Doktor pada University of Chicago, USA pada 1984 dengan disertasi berjudul *Ibn Taimiyya on Kalam and Falasifa*. Seorang cendekiawan yang dikenal dengan gagasannya “Islam Yes, Partai Islam No”, dan juga dengan Islam Inklusifnya.

Semasa mahasiswa pernah menjabat Ketua Umum HMI dua periode (1966-1971), Presiden Persatuan mahasiswa Islam Asia Tenggara, Wakil sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Student Organisation), adapun kedudukan lainnya sebagai Pemimpin Umum Majalah Mimbar Jakarta (1971-1974), Direktur LSIK Jakarta (1973-1976), Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Islam Samanhudi Jakarta (1974-1992), Fellow dalam Einshover Fellowship (1990), Ketua dan Pendiri Yayasan wakaf Paramadina, Rektor Universitas Paramadina, dosen pada IAIN Jakarta, serta belakangan sebagai Ketua PMKI (Persatuan Membangun Kembali Indonesia).

Sebagai penulis aktif, beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain, *Khazanah Intelektual Islam* (Bulan Bintang, Jakarta, 1986), *Islam Kemedernan dan Keindonesiaan* (Mizan, Bandung, 1988), *Islam Doktrin dan Peradaban* (Mizan, Bandung, 1993), *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Paramadina, Jakarta, 1994), *Islam Agama Kemanusian* (Paramadina, Jakarta, 1995), *Kaki Langit Peradaban* (Paramadina, Jakarta, 1995), *Tradisi Peran dan Fungsinya Dalam pembangunan di Indonesia* (Paramadina, Jakarta, 1997), *Masyarakat Religius* (Paramadina, Jakarta, 1997), *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Paramadina, Jakarta, 1997), *Bilik-bilik Pesantren* (Paramadina, Jakarta, 1997).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Rizano  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 12 Nopember 1980  
Alamat : Ambokembang Gg: IV/515 Pekalongan 51173  
Anak ke- : Delapan dari sepuluh bersaudara

### *Nama Orang Tua*

Bapak : Waselan  
Ibu : Munda'ah

### *Jenjang Pendidikan*

- SD Muhammadiyah 04 Pekajangan -Masuk tahun 1987
- SMP Muhammadiyah Pekajangan -Masuk tahun 1994
- SMA Muhammadiyah 2 Pekalongan -Masuk tahun 1996
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta -Masuk tahun 2000

### *Keorganisasian*

- Ketua Umum Asrama Mahasiswa GKBI "Wisma Sarjana" Yogyakarta periode 2004-2005.
- Sekretaris Asrama Mahasiswa GKBI "Wisma Sarjana" Yogyakarta periode 2003-2004.
- Anggota FPK (Forum Pembaca Kompas) periode 2004

### *Karya Tulis:*

Artikel Pernah di muat dalam Kompas Jogja, 13 Juli 2004 "Koperasi dan Tantangan Pengembangan SDM".